

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Langkah Tepat dan Cepat Pengendalian, Penanggulangan serta Pemberantasan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

### DASAR PEMIKIRAN

Virus PMK mewabah kembali Indonesia *outbreak* pertama kali ditemukan pada tanggal 5 Mei 2022, sebanyak 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto Jatim. PMK berkembang cepat, data siagapmk.id (28/06/22) menyerang ruminansia 283.530 ekor (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) di 219 kabupaten/kota atau 19 provinsi. UU 18/2009; Jo UU No.41/2014; PP No.47/2014. Pasal 2 Ayat (1) Pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan.

### KAJIAN EMPIRIS

Hingga kini pemerintah belum mendeklarasikan asal muasal virus PMK, pemerintah lamban dalam pengendalian dan penanggulangan wabah PMK. Guna menekan angka penyebaran yang lebih luas ke provinsi yang lain. Sejak (9/05/22) Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Pertanian segera melakukan *lockdown* wilayah dan pengawasan. Publik menuntut pemerintah segera menerapkan biosekuriti secara *massif* di daerah zona merah. Mempercepat vaksinasi, pemberian obat-obatan, vitamin, antibiotik, desinfektan hingga ganti rugi peternak yang terdampak.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penyebaran PMK bersifat *aerogen* penyebaran virus PMK sangat cepat, maka diperlukan tindakan terdepan yaitu vaksinasi yang dikemas dengan strategi pengendalian. *Support* tindakan lain yaitu uji terap di karantina untuk melakukan sanitasi sehingga memilih desinfektan yang peka.
2. Pemberian obat-obatan sangat diperlukan menjaga kebugaran hewan (*recovery*) agar menggantikan sel-sel yang rusak. Penggunaan antibiotik menghambat infeksi sekunder. Maka diperlukan multivitamin, antipiretik, anti radang dan

disinfektan.

3. Lalu lintas ternak hidup dan lalu lintas perdagangan bahan pangan asal ternak perlu menjadi dan mendapat perhatian yang serius karena berhubungan dengan penyebaran virus PMK.
4. Hewan yang sembuh dari Virus PMK perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi *carrier* PMK hingga beberapa tahun setelah sembuh.
5. Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan kompensasi kepada peternak agar mau melaporkan hewan terjangkit PMK.
6. Perlu dilakukan percepatan pengadaan vaksin Virus PMK agar penyebaran virus PMK terkendali sehingga mengurangi kerugian yang timbul akibat adanya PMK.
7. Terkait dengan Sapi terkena PMK yang disposal namun tidak ada ganti rugi maka bisa digunakan sebagai Buffer Stock daging pemerintah. Melalui Badan Pangan Nasional melakukan penugasan kepada Bulog atau ID Food.
8. Pemerintah perlu melakukan *monitoring*, *surveilans* dan membuat SOP yang benar agar kejadian serupa dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Perlu segera menetapkan wabah karena selama 2 bulan wabah tidak ditetapkan kegiatan bisnis berjalan seperti biasanya.
9. Tidak ada pengetatan lalu lintas media pembawa virus seperti bahan asal ternak, alat transportasi, pakan ternak, semen dan embrio, dan lalu lintas barang juga manusia. Sehingga penyebaran PMK semakin massif.
10. Vaksinasi PMK wajib segera dilakukan pada sapi sehat baik yang belum pernah terinfeksi maupun yang sudah sembuh. Dengan mendahulukan sapi sehat karena sapi sembuh secara alami membentuk antibodi. Namun vaksin diadakan oleh pemerintah pusat sangat lambat sekali.
11. Penyebaran PMK perlu dilakukan pemusnahan (*disposal*) barang-barang yang terkontaminasi. Dekontaminasi melalui penyemprotan (*desinfektan*) kandang, peralatan, kendaraan, serta bahan-bahan lainnya yang memiliki potensi menularkan PMK.
12. Anggaran wabah PMK melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN. Satgas mendapatkan dana operasional sebesar Rp0,5 Triliun. Sedangkan Kementan mendapatkan Rp4,4 Triliun. Anggaran besar harus segera direalisasikan untuk pembelian obat-obatan, penggantian ternak dan vaksinasi.